PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Oleh:
Putri Wulan Sari

Pembimbing:
Dr. Ony Widilestariningtyas, SE.,M.Si.,Ak

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine how much the influence of public sector accounting and internal controls on the performance of government agencies the plantation office of West Java Province.

The method used in this research are descriptive and verifycative methods. Descriptive method is used to describe the variable of public sector accounting, internal control and performance variable. Is used statistical test using SmartPLS 2.0 software to determine the effect of application influence of public sector accounting and internal controls.

The results of this study indicate theat the implementation of public sector accounting significantly affect positively on the performance of government agencies, and unternal controls significantly affect positively to the government agency in the Plantation Office Of West Java Province.

Keywords: public sector accounting, internal control, performance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan transformasi paradigma akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah atasan) menjadi akuntabilitas kepada masyarakat di daerah. Perubahan ini menurut mekanisme akuntabilitas dari manajemen pemda kepada masyarakat di daerah selaku pemberi mandat (Mardiasmo, 2002).Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiriadalah bidang Keuangan Daerah (Wawan Sukmawan. 2009).

Peran pemerintah daerah sangat menyentuh kehidupan masyarakat, bahkan sering layanan yang merupakan produk pemerintah daerah tersebut juga menyangkut kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapainya menunjukan tingkat peradaban masyarakat.Masyarakat terus berkembang dengan segenap tuntutannya, demikian juga pemerintah daerah.Hal ini berimplikasi pada kompleksitas layanan yang semakin tinggi. Dan membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Kinerja intansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis karena saat ini perbaikan kinerja intansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto,2002). Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan compability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting (Urip Santoso, 2008).

Terdapat beberapa kasus dalam kinerja intansi pemerintah yang di sampaikan oleh BPK, diantaranya adalah kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Selain itu terdapat 3 merupakan temuan yang merugikan nergara sebesar .

Merupakan temuan ketidakefisienan kinerja instansi dan selebihnya merupakan temuan ketidakefektivan dari pencapaian kinerja (Bahrullah Akbar, 2013).

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektifitas penggunaan sumber daya *(Value For Money)* dan terlihat secara jelas outcome yang di hasilkan (Urip Santoso, 2008).

Di sisi lain, untuk mewujudkan kinerja pemda yang sesuai *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah lingkungan Pemda (Mardiasmo, 2009). Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pengawasan intern *(internal control)* yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Abdul Rohman, 2009).

Ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 200 pasal 41 (1) yaitu pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama kepala daerah. Demikian pula dalam keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 pasalm(6), dinyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Askam Tusikal, 2008).

Otonomi memberikan keleluasaan (*diskresi*) pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas.Hal ini salah satunya dapat dicapai dengan penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dengan demikian, otonomi daerah sarat muatan dengan membawa banyak perubahan paradigma yang juga dibawa oleh paradigma akuntansi dan audit sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkabn tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Indra Bastian, 2010).

Pemerintahan yang bersih dapat di impretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dua puluh tahun yang lalu kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diatrikan sebagai pemerintahan yang bersih.Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi (Indra Bastian 2010).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh Pemerintah (Urip Santoso 2008).

1.2.Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sector publik terhadap kinerja intansi pemerintahan.
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan bahwa adanya pengaruh akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Besarnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja intansi pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
2. Besarnya pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja intansi pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1.Akuntansi Sektor Publik

Istilah Sektor Publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik,hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2009:1) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat denga penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) yayasan organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirbala lainnya.

Menurut Dedi Nordiawan (2008) akuntansi sektor publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Indra Bastian (2010:3) Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkabn tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Indra Bastian (2010:318) Siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah:

1. “Analisis Bukti Transaksi
2. Pencatatan data transaksi
3. Pengikhtisaran 4. Pelaporan”

Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor public yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.”

2.1.2 Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan,

dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan member dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai. (Wawan Sukmana, 2009:582)

Pengawasan berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.(*Swayer's*, 2005:57)

Menurut Sawyer's (2005:58) tujuan pengawasan internal adalah:

a) Keandalan pelaporan keuangan
b) Efektivitas dan efisiensi operasi
c) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yg berlaku

Pengawasan yang efektif dan efisien harus dilakukan kontinyu agar dapat diketahui perubahan atau perbaikan yang telah atau belum dikerjakan dari temuan beruapa kekurangan atau kelemahan antara dua atau lebih kegiatan pengawasan.

Menurut Swayer's (2005:57) Pengawasan berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan."

Menurut Sawyer's (2005:77) ada beberapa sarana oprasional yang dapat digunakan manajer untuk mengontrol fungsi didalam perusahaan, sarana tersebut adalah:

1. Organisasi (organization)
2. Kebijakan (Policy)
3. Prosedur (Procedure)

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja adalah Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika

Prawirosentono (2008:2) mengemukakan bahwa kinerja adalah Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Mardiasmo (2009:21), value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefit and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik.. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 2010:88).

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012:11) penerapan akuntansi sektor publik, berpengaruh terhadap kinerja instansi. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

2.2.2 Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan member dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai. (Wawan Sukmana, 2009:582)

Menurut Hasil penelitian Askam Tuskal (2008:82) menunjukkan bahwa Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

1. Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Menurut (Husein Umar, 2005:303) (dalam Umi Narimawati, dkk, 2010:29) objek penelitian adalah:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian .Juga di mana dan kapan penelitian dilakukan.Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Dapat disimpulkan bahwa pengertian objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian ilmiah. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

3.2 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran varibel akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan variabel kinerja .Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal digunakan pengujian statistic menggunakan *software SmartPLS 2.0.*

3.3 Oprasionalisasi variable

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) adalah :

"Penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Adapun Variabel independen pada penelitian ini adalah akuntansi sektor publik dan pengawasan internal. Sedangkan variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kinerja instansi pemerintah.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban.Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*.

3.4 Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor public dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah adalah data primer.Data primer dalam penelitian ini adalah variabel akuntansi sektor publik,

pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah yang diperoleh langsung dari pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

3.5 Sampel

Yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai yang ditempatkan di Sub bagian keuangan, Sub kepegawaian, Sub perencanaan, Sub SDM (Sumber daya manusia) dan Sub bagian Anggaran yang ada pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yang berjumlah 40. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak populasi karna populasi berjumlah kurang dari 100.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pengaruh pengendalian intern dan pelaksanaan terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.1.1 Pengujian Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan kata lain untuk melihat apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan dari variabel yang diteliti. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) dan konsisten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 40 responden secara berulang-ulang dalam waktu berbeda *(range)* 2 minggu.

4.2 Pengujian Model Pengukuran

4.2.1 Pengukuran Variabel Penerapan akuntansi sektor publik

Nilai *loading factor*untuk masing-masing outer model (korelasi antara konstruk dengan variabel)yang secara umum sudah memenuhi *Convergent Validity* dimana *loading factor*yang diperoleh di atas nilai yang dianjurkan yakni sebesar 0,50 sehingga konstruk (variabel manifes)untuk variabel laten Penerapan akuntansi sektor publik tidak ada yang dieliminasi dari model. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung setiap indikator lebih besar dari nilai kritis 1,96

Variabel laten Penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai *composite reliability* (CR) dari ketiga dimensi variabel Penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,891. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten masih lebih besar dari yang di rekomendasikan yaitu 0,70

4.2.2 Pengukuran Variabel Pengawasan internal

Nilai *loading factor*untuk masing-masing outer model (korelasi antara konstruk dengan variabel)yang secara umum sudah memenuhi *Convergent Validity* dimana *loading factor*yang

diperoleh di atas nilai yang dianjurkan yakni sebesar 0,50 sehingga konstruk (variabel manifes)untuk variabel laten Pengawasan internal tidak ada yang dieliminasi dari model. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung setiap indikator lebih besar dari nilai kritis 1,96

Variabel laten Pengawasan internal memiliki nilai *composite reliability* (CR) dari ketiga dimensi variabel Pengawasan internal sebesar 0,857. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten masih lebih besar dari yang di rekomendasikan yaitu 0,70.

4.2.3 Pengukuran Variabel Kinerja instansi pemerintah

Nilai *loading factor*untuk masing-masing outer model (korelasi antara konstruk dengan variabel)yang secara umum sudah memenuhi *Convergent Validity* dimana *loading factor*yang diperoleh di atas nilai yang dianjurkan yakni sebesar 0,50 sehingga konstruk (variabel manifes)untuk variabel latenKinerja instansi pemerintahtidak ada yang dieliminasi dari model.

Variabel laten Kinerja instansi pemerintah memiliki nilai *composite reliability* (CR) dari kelima dimensi variabel Kinerja instansi pemerintah sebesar 0,877. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten masih lebih besar dari yang di rekomendasikan yaitu 0,7.

4.2.4 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*/CV)

1. Hasil korelasi konstruk Penerapan Akuntansi sektor publik dengan indikatornya $X_{1.1}$ (analisis bukti transaksi), $X_{1.2}$ (pencatatan data transaksi), $X_{1.3}$ (pengikhtisaran), $X_{1.4}$ (pelaporan) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Akuntansi sektor publik (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya.
2. Hasil korelasi konstruk Pengawasan Internal dengan indikatornya $X_{2.1}$(organisasi), $X_{2.2}$(kebijakan), $X_{2.3}$(prosedur) , $X_{2.4}$(penganggaran) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Pengawasan Internal (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya.
3. Hasil korelasi konstruk Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan indikatornya Y_1 (Ekonomis), Y_2 (Efisien), Y_3 (Efektifitas), lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten kinerja instansi pemerintah (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya.

4,3 Pembahasan

4.3.1 H1: Pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik terhadap Kinerja instansi pemerintah menunjukkan Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh dapat dilihat nilai nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel Penerapan akuntansi sektor publik terhadap Kinerja instansi pemerintah (4,381) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$(1,96)sehingga disimpulkan hipotesis teruji.

Besarnya pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik terhadap Kinerja instansi pemerintah adalah 44,8%. Nilai pengaruh ini relatif besar. Total pengaruh yang diperoleh terdiri atas pengaruh langsung Penerapan akuntansi sektor publik terhadap Kinerja instansi pemerintah sebesar 32,6% dan pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik secara tidak langsung terhadap Kinerja instansi pemerintah karena adanya hubungan dengan Pengawasan internal sebesar 12,2%.

Hal ini sesuai dengan yang peneliti temukan dilapangan yaitu, Persentase Penganalisisan buti transaksi masuk dalam kategori cukup baik, besar penilaian responden belum mencapai 100% yang di harapkan dengan adanya gap sebesar 34,0% . Gap ini menunjukan bahwa analisis bukti transaksi pada dinas perkebunan masih adanya permasalahan dalam menganalisis bukti transaksi, diakibatkan kurangnya ketelitian SDM dalam penganalisisan bukti sehingga mempengaruhi akun yang lain.

Persentase Pencatatan data transaksi masuk dalam kategori cukup baik, besar penilaian responden belum mencapai 100% yang di harapkan dengan adanya gap sebesar 25,5% . Gap ini menunjukan bahwa pencatatan data transaksi pada dinas

perkebunan masih terdapat masalah dalam pencatatan dikarnakan adanya ketidak sesuaian pencatatan dikarenakan human error dengan kesalahan penempatan sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Sehingga untuk memperbaiki masalah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan yang andal dengan pengembangan mutu tenaga kerja yang ahli di bidang akuntansi, dengan berbagai pelatihan di bidang akuntansi dan mengembangkan sistem akuntansi. .

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan, dimana dengan penerapan akuntansi yang optimal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintahan di Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Hasil penelitian ini di dukung oleh teori yang menyatakan bahwa Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan instansi pemerintah. (Indra Bastian, 2010) dan didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.(Bambang Pamungkas, 2012)

4.3.2 H2: Pengaruh Pengawasan internal Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh Pengawasan internal terhadap Kinerja instansi pemerintah menunjukkan Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh dapat dilihat nilai nilai t_{hitung} variabel Pengawasan internal terhadap Kinerja instansi pemerintah (2,172) lebih besar dari t_{kritis}(1,96)sehingga disimpulkan hipotesis teruji.

Besarnya pengaruh Pengawasan internal terhadap Kinerja instansi pemerintah adalah 20,1%. Nilai pengaruh ini relatif kecil. Total pengaruh yang diperoleh terdiri atas pengaruh langsung Pengawasan internal terhadap Kinerja instansi pemerintah sebesar 7,9% dan pengaruh Pengawasan internal secara tidak langsung terhadap Kinerja instansi pemerintah karena adanya hubungan dengan Penerapan akuntansi sektor publik sebesar 12,2%.

Fenomena yang terjadi di Pengawasan Internal saat ini adalah Terdapat kasus kasus penyimpangan administrasi. Tidak didukungnya SOP (Standar Oprasional), adanya perangkapan fungsi, serta petunjuknya tidak jelas. Hal itu merupakan kelemahan-kelemahan di lingkungan organisasi yang tidak dapat dikuantitatifkan dalam bentuk nilai rupiah (Hasan Bisri, 2014).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu, Besaran penilaian yang diberikan responden tidak mencapai 100% yang diharapkan. Sehingga antara tingkat ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual terdapat gap sebesar 26,1%. Gap ini menunjukkan pengawasan internal masih belum mencapai tingkat ideal. Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan internal dinilai masih belum optimal sehingga masih terdapat permasalahan.

Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan pengawasan. Perlunya mengkomunikasikan informasi kepada karyawan dan memperhatikan pentingnya memberikan *rewards* dan *punishment* untuk para pegawai yang berhak mendapatkannya, hal tersebut akan mampu meningkatkan kepatuhan para karyawan terhadap peraturan dan juga untuk memotivasi dalam pekerjaan, sehingga akan terciptanya kinerja yang efektif dan efisien, karena dengan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kinerja yang sesuai *value for money* perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksa fungsionl pemerintah. fungsi pengawasan internaluntuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi (Abdul Rohman, 2009). Dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah baik secara parsial maupun simultan (Askam Tuskal, 2008).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi sektor publik meberikan pengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Besar pengaruh akuntansi terhadap kinerja mencapai nilai Koefisien Determinasi 32,6% dan pengaruh tidak langsung Akuntansi sektor publik terhadap kinerja akibat adanya hubungan dengan pengawasan internal sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya 44,8,, namun Pengaruh nya tidak mencapai 100% karena masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja yang peneliti tidak teliti.
2. Pengawasan internal memberikan pengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja mencapai nilai Koefisien Determinasi 7,9%, dan pengaruh tidak langsung karena dipengaruhi akuntansi sektor publik sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya adalah 20,1%, pengaruhnya relatif rendah karena masih memiliki masalah dan masih ada faktor lain yang memepengaruhi kinerja.

5.2 Saran

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku _____

Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit: Erlangga

Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, James H.Scheiner. 2005. *Sawyer's Internal Audit: Internal Audit Sawyer.* Jakarta. Penerbit:Salemba4

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Andi

Mulyadi,2001. *Sistem Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.

Abdul, Rohman 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah).* Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852

Askam Tuasikal. 2008. *PengaruhPengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangandan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Vol.10. No 1.ISSN : 1410-8623

Bambang Pamungkas, 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Volume 12 No.2

Mardiasmo, 2002. *Elaborasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan system akuntansi keuangan pemerintah daerah*. JAAI Vol 6 No.1 ISSN 1410-2420

Urip Santoso, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.* ISSN: 0216-1249

Wawan Sukmana, Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. ISSN: 1907-9958

Artikel_____

Bahrullah Akbar, 2013. Pentingnya efektivitas penerapan sistem Pengendalian intern dan pengelolaan risiko manajemen di ingkungan bumn. Jakarta: www.bpk.go.id/news

Bahrullah Akbar, 2014. *bpk ri dorong optimalisasi pengawasan keuangan negara*, Jakarta: www.bpk.go.id/news

Hasan Bisri, 2014. *bpk ri temukan 13969 kasus senilai rp5698 triliun*. Jakarta: www.bpk.go.id/news
Hasan Bisri, 2012. *Perjalanan dinas boros 40 persen*. Jakarta: www.bpk.go.id/news

Sapto Amal Damandari. 2013. belanja kl rp1 triliun bermasalah. Jakarta: www.bpk.go.id/news

LAMPIRAN

Tabel Desain Penelitian

Tujuan Penelitan	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang Digunakan**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	Deskriptif & Verifikatif	*Survey*	Intansi Pemerintah	*Cross Sectional*
T-2	Deskriptif & Verifikatif	*Survey*	Intansi Pemerintah	*Cross Sectional*

Tabel Oprasionalisasi variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Kuisioner
Penerpan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	Menurut Dedi Nordiawan (2008) akuntansi sektor publik adalah : "Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan".	Siklus Akuntansi Sektor publik (Indra Bastian, 2010): **1.** Analisis Bukti Transaksi **2.** Pencatatan data transaksi **3.** Pengikhtisaran **4.** pelaporan	Ordinal	1 2 3 4
Pengawasan Internal (x_2)	*Menurut Swayer's*(2005:57) adalah:Pengawasan berisi susunan organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.	*Sawyer's* (2005:77) sarana oprasional: 1. organisasi 2. kebijakan 3. prosedur 4.Penganggaran	Ordinal	5 6 7 8
Kinerja (Y)	(Prawirosentono 2008:2) Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika".	*Value for money* (Mardiasmo,2009) 1.Ekonomis (cermat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya) 2.Efisiensi (Penggunaan sumber daya) 3.Efektivitas (Pencapaian tujuan)	Ordinal	9 10 11

Tabel Model pengukuran variable akuntansi sektor publik

Variabel Manifest	*Loading factor*	*Measurement model*	R^2	t_{hitung}
Analisis Bukti Transaksi	0,890	$X_{1.1}$ = 0,890 X_1 + 0,208	0.792	33,379
Pencatatan Data Transaksi	0,882	$X_{1.2}$= 0,882 X_1 + 0,222	0.778	29,468
Pengikhtisaran	0,706	$X_{1.3}$ = 0,706 X_1 + 0,501	0.499	5,189
Pelaporan	0,792	$X_{1.4}$ = 0,792 X_1 + 0,373	0.627	10,379
***Composite Reliability* (CR) = 0,891**				
***Average Variance Extracted* (AVE) = 0,674**				

Sumber : Lampiran Output SmartPLS

Tabel Model pengukuran variable pengawasan internal

Variabel Manifest	*Loading factor*	*Measurement model*	R^2	t_{hitung}
Organisasi	0.820	$X_{2.1}$ = 0,820 X_2 + 0,327	0.673	16,684
kebijakan	0.808	$X_{2.2}$ = 0,808 X_2 + 0,347	0.653	8,071
Prosedur	0.731	$X_{2.3}$ = 0,731 X_2 + 0,466	0.534	11,268
Penganggaran	0.738	$X_{2.4}$ = 0,738 X_2 + 0,456	0.544	8,980
***Composite Reliability* (CR) = 0,857**				
***Average Variance Extracted* (AVE) = 0,601**				

Sumber : Lampiran Output SmartPLS

Tabel Model pengukuran variable kinerja instansi peerintah

Variabel Manifest	*Loading factor*	*Measurement model*	R^2	t_{hitung}
Ekonomis	0,880	Y_1 = 0,880 $Y_{.1}$ + 0,225	0.775	22,580
Efisiensi	0,841	Y_2 = 0,841 $Y_{.2}$ + 0,293	0.707	14,370
Efektivitas	0,796	Y_3 = 0,796 $Y_{.3}$ + 0,367	0.633	22,694
***Composite Reliability* (CR) = 0,877**				
***Average Variance Extracted* (AVE) = 0,705**				

Sumber : Lampiran Output SmartPLS

Tabel Nilai *Convergent validity*
Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

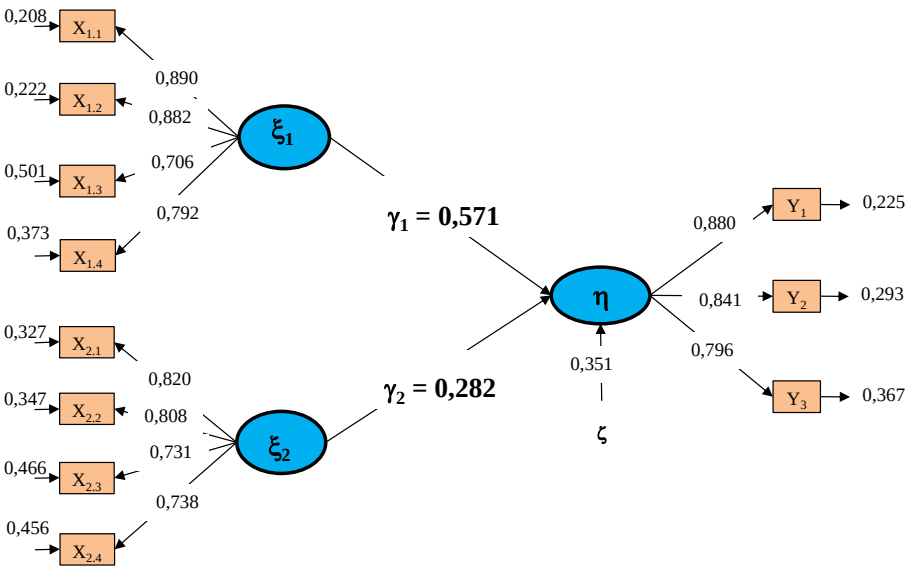
	X1 (ASP)	X2 (Pengawasan I)	Y (KINERJA)
X1.1	0.889766	0.75897	0.816652
X1.2	0.882321	0.705726	0.610328
X1.3	0.706368	0.414616	0.488862
X1.4	0.792001	0.550455	0.595831
X2.1	0.720298	0.820413	0.692941
X2.2	0.478806	0.808288	0.526146
X2.3	0.637529	0.73065	0.422172
X2.4	0.499887	0.737854	0.519214

Y1	**0.602929**	**0.522927**	**0.880251**
Y2	**0.553986**	**0.525188**	**0.840706**
Y3	**0.768427**	**0.705988**	**0.795668**

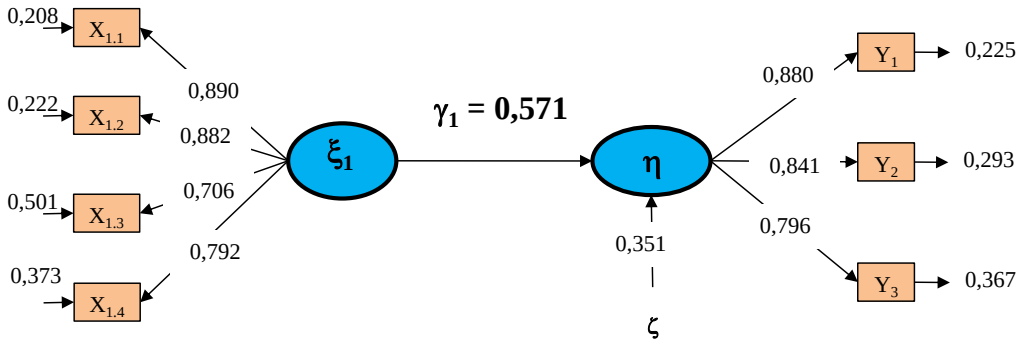
Tabel Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

Variabel	Composite Reliability
X1 (ASP)	0,891
X2 (PENGAWASAN I)	0,857
Y (KINERJA)	0,877

Gambar Diagram jalur model lengkap



Gambar Pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik Terhadap Kinerja instansi pemerintah



Gambar Pengaruh Pengawasan internal Terhadap Kinerja instansi pemerintah

